

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2010

TANGGAL 8 MARET 2011

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 27 ayat (2) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Laporan keterangan dimaksud disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 23 peraturan pemerintah dimaksud bahwa LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD, berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan informasi dari Pemerintah kepada DPRD terkait dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun. Diharapkan melalui tertib dan mekanisme

penyampaian laporan pertanggungjawaban ini, dapat lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks inilah sebagai bentuk implementasi dari kewajiban tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Ternate Tahun Anggaran 2010, dengan format dan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Daerah

BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- B. Pengelolaan Belanja Daerah

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
- B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
- B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

BAB VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

- A. Kerjasama Antar Daerah
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
- D. Pembinaan Batas Wilayah
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

BAB VII Penutup

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Pemerintahan Daerah

Gambaran perkembangan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun terakhir semakin kondusif, yang ditandai dengan transisi pergantian kepemimpinan sejak tanggal 10 Agustus 2010, sebagai konsekuensi dari pemilihan Walikota Ternate masa jabatan 2011-2015, yang telah berlangsung secara demokratis, aman dan damai, sejalan dengan kepemimpinan baru serta dengan Visi-Misi “BAHARI BERKESAN”, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi sejumlah permasalahan khas maupun permasalahan aktual perkotaan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, antara lain :

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahaan Dan Pelayanan Publik
2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian Dan Kesejahteraan
3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan
4. Masalah Banjir, Sampah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Masalah Pendidikan, Kesehatan
6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan
7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal
8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

Upaya mengatasi permasalahan tersebut dilakukan melalui 11 Program Prioritas, yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate 2011-2015.

Selain itu Pemerintah Kota Ternate telah melakukan langkah-langkah konsolidasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain peningkatan disiplin aparatur, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui berbagai kegiatan spiritual secara rutin bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Ternate.

Kita sadari perkembangan dan pertumbuhan Kota Ternate yang begitu pesat, baik lonjakan penduduk, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan permasalahan sosial yang semakin kompleks mengharuskan adanya komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks inilah Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat yang telah mendukung dan meresponi kebijakan kami di tahun pertama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Ternate tahun 2011.

Tabel Administrasi Wilayah Kota Ternate

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota
1	Ternate Utara	14	Dufa-dufa
2	Ternate Tengah	15	Salahuddin
3	Ternate Selatan	17	Kalumata
4	Pulau Ternate	13	Jambula
5	Moti	6	Moti Kota
6	Batang Dua	6	Mayau
7	Hiri	6	Dorari Isa
Jumlah		77	

Sumber : BPS Kota Ternate, 2010

2. Kondisi Geografis Daerah

a. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah Kota Ternate 5795,4 Km², terdiri dari luas perairan 5.633,565 Km² dan luas daratan 161,84 Km²

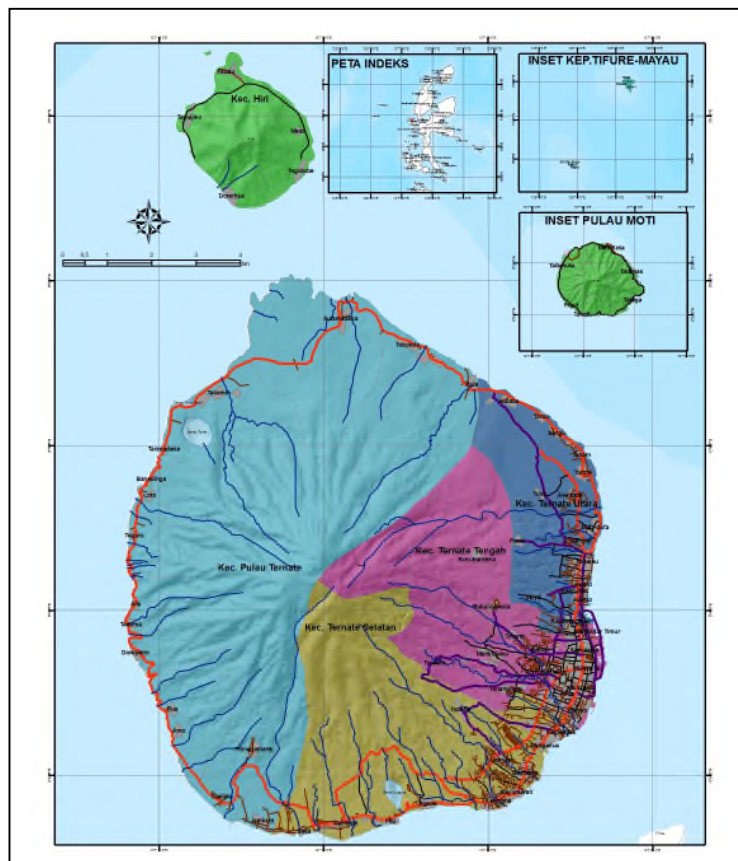
Wilayah Kota Ternate terletak antara 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur, Kota Ternate berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Gurida
7. Pulau Maka
8. Pulau Mano

Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate



b. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut :

1. *Rogusal* : - Pulau Ternate
- Pulau Hiri
- Pulau Moti
2. *Rensika* : - Pulau Mayau
- Pulau Tifure
- Pulau Maka
- Pulau Mano
- Pulau Gurida

c. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah : 0-499 M, Sedang : 500-699 M, dan Tinggi : lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau. 5 pulau yang berpenghuni, yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

3. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari hasil Sensus Penduduk sebanyak 185.707 jiwa.

b. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kondisi Kota Ternate dirasakan semakin padat. Dengan luas wilayah daratan 161,84 km² dan jumlah penduduk sebanyak 185.707 jiwa, kepadatan penduduk Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar 1147 jiwa per km². Ini berarti bahwa terjadi peningkatan kepadatan sebanyak 7 jiwa per km² atau 0,61% bila dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 1140 jiwa per km². Penduduk Kota Ternate sebagian besar tinggal di Pulau Ternate dan tantangan yang harus diatasi adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah (Kota Ternate) yang memiliki peluang dalam rangka pengembangan diklasifikasikan dalam beberapa sektor, yaitu :

1. Perikanan

Wilayah perairan laut Kota Ternate memiliki *standing stock* ikan sebesar 71.757,28 ton/tahun, dengan potensi lestari (MYS) sebesar 47.838,25 ton/tahun. Komoditi perikanan tersebut terdiri dari ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, tongkol, ikan pelagis kecil seperti Selar, Layang,

Kembung, Julung, Ekor Kuning, Teri, dan ikan dasar seperti Kerapu, Bawal, Kakap merah, dan beberapa ikan lainnya.

Hasil identifikasi jenis-jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di sekitar pantai terdapat sekitar 217 jenis ikan, 45 diantaranya bernilai ekonomis penting, 172 jenis telah dikomersialkan termasuk didalamnya cumi-cumi, udang lobster, penaeid, ikan teri dan nener estuary, serta 9 jenis ikan hias ekonomis penting. Hasil identifikasi dan estimasi produksi sumber daya perikanan tangkap di perairan Kota Ternate tahun 2010 mencapai 15.439,56 ton, dengan penyebaran sumber daya ikan yang hamper merata di seluruh wilayah Kota Ternate.

2. Jasa dan Perdagangan

Salah satu potensi Kota Ternate yang cukup menonjol adalah sektor jasa dan perdagangan, yang sekaligus salah satu misi pembangunan Kota Ternate, perkembangan sektor jasa dan perdagangan dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, sehingga memberikan kontribusi dalam pembentukan struktur ekonomi, meliputi sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, jasa, transportasi dan komunikasi.

Beberapa faktor potensial sebagai penunjang adanya peluang-peluang dimaksud yaitu : letak strategis Kota Ternate sebagai titik sentral transportasi/perhubungan (laut dan udara) dalam wilayah Maluku Utara, sehingga menjadikan Ternate sebagai pintu masuk dan titik temu perdagangan lokal (perdagangan), adanya sarana dan prasarana penunjang seperti Bandara Babullah dan Pelabuhan Laut (Dermaga Ahmad Yani) serta didukung dengan ketersediaan sarana transportasi lokal lainnya yang menghubungkan Kota

Ternate dengan beberapa kabupaten/kota, dan ketersediaan ruang publik pengembangan investasi melalui kebijakan pengembangan kawasan khusus sebagai pusat bisnis dan perdagangan (*central bussines distric*). Sejalan dengan tingginya aktivitas pembangunan sektor perdagangan telah ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sarana perbankan.

3. Pariwisata

Potensi pariwisata merupakan salah satu primadona Kota Ternate, oleh karena itu pariwisata merupakan bagian dari misi pembangunan, fokus pengembangan sektor pariwisata mencakup wisata sejarah, hal ini ditandai dengan adanya peninggalan beberapa situs bersejarah, seperti Keraton dan Masjid Kesultanan, serta benteng-benteng peninggalan yang terus dilestarikan sebagai objek wisata sejarah. Kemudian wisata bahari ditandai dengan karakteristik Kota Ternate yang memiliki panorama alam yang sangat indah, seperti adanya Danau Laguna, Danau Tolire dan beberapa pantai yang sangat strategis bagi pengembangan pariwisata serta wisata budaya, hal ini ditandai dengan adanya perbendaharaan budaya Kota Ternate yang sangat beraneka ragam dan memiliki arti dan makna yang sangat penting, bahkan menjadi perekat bagi masyarakat Kota Ternate, seperti beberapa cagar budaya, tari-tarian, seni dan adat istiadat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Potensi wisata ini semakin kondusif karena telah didukung oleh infrastruktur yang relatif cukup memadai seperti transportasi udara dan perhotelan, terutama setelah adanya hotel bertaraf Internasional Amara Bela Internasional Hotel. Dengan demikian Kota Ternate dirasakan sangat kondusif dalam

menyambut tahun kepariwisataan yang dicanangkan oleh pemerintah.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Program dan kebijakan Pembangunan Kota Ternate bidang ekonomi pada tahun 2010 telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Ternate, yang secara langsung memberikan dampak positif terhadap sektor pemberi kontribusi dan sekaligus menjadi *multiplier efek* bagi sektor-sektor lainnya, serta mampu membuat perekonomian di Kota Ternate berkembang dengan trend yang meningkat.

Dalam kurun waktu satu tahun perekonomian Kota Ternate ditinjau dari ekonomi makro, memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang telah terimplementasi pada setiap program dan kegiatan SKPD telah memberikan dampak yang positif baik pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, maupun peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro lainnya, sehingga perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate Insya Allah dapat tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan keberhasilan perekonomian suatu wilayah parameteranya adalah indikator ekonomi, yaitu dengan melihat seberapa besar perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi ini diartikan sebagai pertumbuhan produksi barang dan jasa yang diukur oleh nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi.

Kami menyadari bahwa pembangunan dibidang ekonomi tidak selalu berorientasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperlihatkan trend peningkatan, akan tetapi diharapkan bahwa kedepan nanti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga harus diikuti dengan distribusi pedapatan yang

normal sehingga kesenjangan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat serta kesenjangan antar wilayah, khususnya pada kecamatan-kecamatan yang berada di luar pulau Ternate, diharapkan kedepan dapat terdistribusi secara adil dan merata.

Posisi Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan dengan 7 Kecamatan, sejak dahulu dikenal sebagai Kota Perdagangan dan saat ini sebagai pintu gerbang Propinsi Maluku Utara. Kota Ternate memiliki nilai lebih dari sudut pandang ekonomi dibanding daerah lain di Propinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan peranan beberapa sektor ekonomi yang merupakan sektor-sektor yang bercirikan perkotaan seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa dan sektor Transportasi dan Komunikasi di Kota Ternate lebih dominan dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Maluku Utara.

Selama satu tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mampu tumbuh sebesar 7,99 %, ini menunjukkan adanya kemampuan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar ini dapat dikatakan bahwa sektor-sektor ekonomi telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung SKPD, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Sektor-sektor ekonomi yang selama beberapa tahun terakhir memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate seperti Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa, masih tetap menjadi sektor yang memberi andil besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

Adanya investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara sinergis juga telah mampu mendorong berbagai perkembangan usaha di Kota Ternate. Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, perbankan dengan permodalan usaha serta pengembangan dan perluasan usaha dari investasi swasta, telah mampu menjaga angka trend pertumbuhan ekonomi dan juga telah mampu menyerap tenaga kerja yang bertambah setiap tahunnya di Kota Ternate.

Dari sembilan sektor ekonomi PDRB Kota Ternate, peranan tiga sektor ekonomi memberikan peran besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate. Namun peranan keenam sektor ekonomi lainnya tidak dapat dikatakan kecil karena perkembangan dari ketiga sektor tersebut tidak terlepas dari adanya peran dan kemampuan berkembangnya keenam sektor tersebut dalam memberikan kontribusi pada pendapatan perkapita masyarakat.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Ternate mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.576.212,- meningkat menjadi Rp. 2.778.299,- Pada tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya adalah inflasi. Makna dari inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Perkembangan harga dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat serta berhubungan dengan produktivitas ekonomi masyarakat.

Inflasi Kota Ternate pada tahun 2010 adalah 5,32% relative rendah bila dibandingkan dengan Inflasi Nasional sebesar 6,96%. Secara umum kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Pertumbuhan jumlah penduduk berhubungan erat dengan permasalahan ketenaga kerjaan. Peningkatan jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan kesempatan kerja hal ini yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi.

Untuk mengukur tingkat pengangguran digunakan pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi berdampak besar pada permasalahan dibidang sosial terutama kemiskinan. TPT di Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar 10,31% lebih baik dari tahun 2009 yaitu sebesar 11,31% (Hasil Sakernas Agustus 2010), ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyerapan tenaga kerja di wilayah ini sebagai dampak adanya perkembangan usaha.

Keterkaitan antara pembangunan dibidang ekonomi dengan pembangunan dibidang sosial dalam hal pencapaian keberhasilannya dapat dihitung dengan suatu penghitungan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia secara konsep dapat dikatakan sebagai pencapaian keseluruhan suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan.

Nilai IPM Kota Ternate yang dihitung secara Nasional pada tahun 2009 sebesar 76,13% meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 75,66% dan secara peringkat Nasional, Kota Ternate berada pada peringkat 42.

Dengan nilai IPM seperti tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan dibidang sosial meliputi kesehatan, dan

pendidikan serta pembangunan ekonomi telah mampu memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Ternate.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Sebagaimana kita ketahui tahun 2010 merupakan tahun transisi kepemimpinan, yaitu berakhirnya masa kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota 2005-2010 tanggal 10 Agustus 2010, dan awal kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota 2010-2015, oleh karena itu dokumen perencanaan yang dipakai sebagai acuan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban ini, adalah dokumen perencanaan peralihan.

Oleh karena itu dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintahan Daerah khususnya dalam konteks pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sejak tanggal 10 Agustus sampai dengan 31 Desember 2010, berpedoman pada Visi-Misi dan 11 Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJM, walaupun masih dalam tahapan transisi 4 (empat) bulan di awal kepemimpinan, karena secara efektif baru mulai berlaku pada tahun 2011, dengan Visi yaitu :

**TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA “BERBUDAYA,
AGAMAS, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN
BERWAWASAN LINGKUNGAN”.**

2. MISI

Misi merupakan instrumen penting untuk menjabarkan Visi Kota Ternate 2011-2015, maka Misi Kota Ternate meliputi :

1. Mewujudkan Ternate Yang Agamis.

2. Mewujudkan Pemerataan Sarana Dan Prasarana Perekonomian Yang Lebih Representatif.
3. Membangun Ternate Sebagai Kota Pesisir Berbasis Lingkungan.
4. Membangun Ternate Sebagai Kota Pariwisata Berciri Budaya Dan Bahari.
5. Membangun Ternate Sebagai Kota Terbuka, Demokratis Dan Adil.
6. Membangun Ternate Yang Sehat Dan Sejahtera.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Ternate dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate 2011-2015, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah meliputi :

1. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Pertama

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Pertama** :

Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan Dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah di luar kawasan perkotaan berupa pemerataan pelayanan Air Bersih dan pelayanan Listrik pada kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Dua

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Dua** :

Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua

tingkatan dengan alokasi dana penunjang melalui APBD, serta pemberian beasiswa dan insentif.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tiga

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tiga** :

Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, yang menjangkau seluruh masyarakat miskin.

4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Empat

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Empat** :

Kebijakan Anggaran (APBD) Yang Proporsional dan Pro Rakyat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Menetapkan *One Village One Program* dengan penguatan pada kapasitas aparatur, serta membangun rumah Layak Huni Keluarga Kurang Mampu dengan dana stimulus Pemerintah Daerah yang melibatkan keswadayaan masyarakat melalui budaya Gotong Royong atau Bari.

5. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Lima

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Lima** :

Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keresasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis, strategi pembangunan yang ditempuh adalah: Penataan kawasan tapak I plus, tapak II dan penataan taman kota serta ruang terbuka hijau perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib dan

mendorong partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai Kota Pantai yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.

6. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Enam

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Enam** :

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.

7. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Tujuh

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Tujuh** :

Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM serta Pedagang Tradisional dan PKL dengan memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi Investor.

8. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Delapan

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Delapan** :

Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Membangun pelayanan satu titik (*one stop services*), untuk pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

9. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sembilan

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sembilan** :

Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan, strategi pembangunan yang ditempuh adalah:

Pemetaan potensi masyarakat pesisir, penyediaan sarana prasarana nelayan serta memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pedampingan pemberdayaan.

10. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sepuluh

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sepuluh** :

Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Meningkatkan pembinaan kerukunan Antar Ummat Beragama, Antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate.

11. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Program Prioritas Ke-Sebelas

Dalam upaya mewujudkan **Program Prioritas Ke-Sebelas** :

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik Yang Dinamis dan Konstruktif, strategi pembangunan yang ditempuh adalah :

Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengutamakan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.

C. PRIORITAS DAERAH

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan dengan memperhatikan permasalahan khas perkotaan dan kondisi obyektif, maka program prioritas daerah mengacu pada 11 Program Prioritas Kota Ternate 2011-2015, sebagai berikut :

1. Peningkatan Dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur Pada Wilayah Kecamatan
2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota Yang Serasi Antara Kebutuhan Dan Daya Dukung Lahan, Antar Aspek Topografi Dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan Dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya Dan Ekologis
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih Dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif Dan Responsif
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan

11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif

Di samping kebijakan prioritas yang tersebut diatas, juga dalam tahun 2010 terdapat beberapa kebijakan strategis yang menonjol, antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
5. Program Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Air Bersih
6. Program Penataan Penerangan Jalan Umum Dan Dekorasi Kota

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana kita ketahui untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah, maka faktor yang sangat penting adalah dengan tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai, oleh karena itu segala upaya ditempuh oleh daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan di daerah, antara lain meliputi :

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam tahun 2010 adalah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang meliputi antara lain :

a. Kegiatan Intensifikasi

1. Pendataan : adalah mendata objek-objek pajak dan retribusi baru yang belum didata dengan tujuan untuk memperluas dan menambah potensi pajak dan retribusi daerah
2. Pendaftaran : adalah mendaftarkan objek-objek pajak dan retribusi baru dengan tujuan untuk menerbitkan NPWPD, agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah potensi pajak dan retribusi daerah
3. Penetapan : adalah mengadakan perhitungan dan menetapkan besaran nilai pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku

4. Penagihan : adalah mengadakan penagihan kepada semua wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang sudah terdaftar

b. Kegiatan Ekstensifikasi

1. Membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
2. Melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi
3. Melakukan kegiatan pengkajian atau survey ke daerah yang lebih maju dengan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Ternate untuk dapat mengetahui kemungkinan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang lain
4. Mengikutsertakan aparat pengelola pendapatan dalam kegiatan seminar dan workshop, baik pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan

2. Target Dan Realisasi Pendapatan

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2010 sebesar Rp. 465.502.127.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 459.986.499.531,- atau 98,82 % dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp. 26.905.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 22.635.148.069,- atau 84,31 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.800.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 8.185.764.248,- atau 93,02 %.

2. Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.855.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 9.877.897.760,- atau 83,32 %.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 304.761.759,- atau 101,59 %.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.950.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 4.266.724.302,- atau 71,71 %.

b. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 359.343.668.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 362.346.090.819,- atau 100,84 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak

Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2010 sebesar Rp. 42.028.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 49.407.571.701,- atau 117,56 %.

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Adapun target bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.377.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 6.999.851.118,- atau 61,53 %.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2010 sebesar Rp. 281.284.868.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 281.284.868.000,- atau 100 %.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2010 sebesar Rp. 24.653.800.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 24.653.800.000,- atau 100 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 79.253.459.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 75.005.260.643,- atau 94 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Adapun target bagi hasil pajak propinsi pada tahun 2010 sebesar Rp. 12.877.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 10.862.834.343,- atau 84,36 %.

2. Dana Penyesuaian

Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 45.569.787.800,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 43.866.312.800,- atau 96,26 %.

3. Penerimaan Lainnya

Adapun target penerimaan lainnya pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.806.672.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp. 20.276.113.500,- atau 97.45 %.

Secara jelas Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate tahun 2010 berdasarkan jenis penerimaan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Ternate Tahun 2010

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	I. PAJAK DAERAH			
	1.1 PAJAK HOTEL	770.000.000	837.277.511	108,73
	1.2 PAJAK RESTORAN	850.000.000	1.017.904.362	119,75
	1.3 PAJAK HIBURAN	100.000.000	36.029.750	36,03
	1.4 PAJAK REKLAME	800.000.000	605.347.200	75,67
	1.5 PAJAK PENERANGAN JALAN	4.400.000.000	4.390.135.425	99,78
	1.6 PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOL. C	1.850.000.000	1.291.670.000	69,82
	1.7 PAJAK USAHA RUMAH KOST	30.000.000	7.450.000	24,83
	TOTAL PAJAK DAERAH	8.800.000.000	8.185.764.248	93,02
	II. RETRIBUSI DAERAH			
	2.1 RET. PELAYANAN KESEHATAN	700.000.000	424.950.500	60,71
	2.2 RET. PEL. PERSAMPAHN/KEBERSHN	1.200.000.000	990.560.000	82,55
	2.3 RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CAPIL	690.000.000	435.675.000	63,14
	2.4 RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	675.000.000	617.440.000	91,47
	2.5 RET. P A S A R	3.250.000.000	3.250.278.585	100,01
	2.6 RET. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	250.000.000	110.895.000	44,36
	2.7 RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	600.000.000	437.885.000	72,89
	2.8 RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERH	250.000.000	76.000.000	30,40
	2.9 RET. T E R M I N A L	350.000.000	221.000.000	63,14
	2.10 RET. PENYEDOTAN KAKUS	80.000.000	17.250.000	21,56
	2.11 RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	855.000.000	704.873.875	82,44
	2.12 RET. IZIN GANGGUAN	800.000.000	1.234.604.925	154,33
	2.13 RET. IZIN TRAYEK	85.000.000	33.250.000	39,12
	2.15 RET. IZIN USAHA PARIWISATA	125.000.000	87.837.000	70,27
	2.16 RET. IZIN REKREASI & HIB. UMUM	125.000.000	87.960.000	70,37
	2.17 RET. PEMASUKAN, PENGELUARAN HEWAN TERNAK	115.000.000	48.710.000	42,36
	2.18 RET. RUMAH POTONG HEWAN	85.000.000	47.000.000	55,29
	2.19 RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	260.000.000	234.500.000	90,19
	2.20 RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK BAHAN PENGADAAN BARANG/JASA	225.000.000	57.370.000	25,50
	2.21 RET. JASA PELABUHAN LAUT	80.000.000	47.791.000	59,74
	2.22 RET. IZIN USAHA PERDAGANGAN	210.000.000	204.450.000	97,36
	2.23 RET. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	150.000.000	30.350.000	20,23
	2.24 RET. IZIN USAHA PENUNJANG ANGK.LAUT	5.000.000	-	-
	2.25 RET. IZIN USAHA ANGKUTAN SEWA	50.000.000	14.500.000	29,00
	2.26 RET. PENG. BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN	10.000.000	-	-
	2.27 RET. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	200.000.000	200.000.000	100,00
	2.28 RET. PEMANFAATAN KAYU OLAHAN	70.000.000	32.277.500	46,11
	2.29 RET. PENGUKURAN KAPAL (PAS KECIL)	70.000.000	23.700.000	33,86
	2.30 RET. TANDA DAFTAR GUDANG	50.000.000	28.150.000	56,30
	2.31 RET. IZIN PERIKANAN	180.000.000	143.189.775	79,55
	2.32 RET. IZIN ANGKUTAN BARANG	50.000.000	32.950.000	65,90
	2.33 RET. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	5.000.000	2.250.000	45,00
	2.34 RET. SURAT IZIN USAHA INDUSTRI (SIUI)	5.000.000	250.000	5,00
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	11.855.000.000	9.877.897.760	83,32
	III. KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN			
	3.1 LABA PENYERTAAN MODAL	300.000.000	304.761.759	101,59
	TOTAL KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	300.000.000	304.761.759	101,59

No Rek	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	IV. LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
	4.1 SUMBANGAN PIHAK KETIGA	3.000.000.000	2.664.992.774	88,83
	4.3 JASA GIRO	400.000.000	159.539.807	39,88
	4.4 BUNGA DEPOSITO	350.000.000	35.671.230	10,19
	4.5 PENERIMAAN LAINNYA	2.200.000.000	1.406.520.491	63,93
	TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	5.950.000.000	4.266.724.302	71,71
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.905.000.000	22.635.148.069	84,13
	B. DANA PERIMBANGAN			
	I. BAGI HASIL PAJAK			
	1.1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	32.709.000.000	31.039.883.308	94,90
	1.2 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (BPHTB)	4.000.000.000	5.339.692.137	133,49
	1.3 P P h PASAL 21	5.319.000.000	13.027.996.256	244,93
	TOTAL BAGI HASIL PAJAK	42.028.000.000	49.407.571.701	117,66
	II. BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM			
	2.1 P S D H	2.609.000.000	714.906.191	27,40
	2.2 R O Y A L T Y	8.605.000.000	6.151.610.416	71,49
	2.3 P E R I K A N A N	163.000.000	133.334.511	81,80
	TOTAL BAGI HASIL SDA	11.377.000.000	6.999.851.118	61,53
	III. DANA ALOKASI UMUM (DAU)			
	DANA ALOKASI UMUM	281.284.868.000	281.284.868.000	100,00
	TOTAL DANA ALOKASI UMUM	281.284.868.000	281.284.868.000	100,00
	IV. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			
	DAK NON REBOISASI			
	4.1 PENDIDIKAN	10.484.500.000	10.484.500.000	100,00
	4.2 KESEHATAN	4.013.100.000	4.013.100.000	100,00
	4.3 INFRASTRUKTUR/JALAN	2.569.000.000	2.569.000.000	100,00
	4.4 INFRASTRUKTUR/AIR BERSIH	650.900.000	650.900.000	100,00
	4.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.867.800.000	2.867.800.000	100,00
	4.6 PERTANIAN	1.161.800.000	1.161.800.000	100,00
	4.7 LINGKUNGAN HIDUP	1.092.900.000	1.092.900.000	100,00
	4.8 KELUARGA BERENCANA	758.200.000	758.200.000	100,00
	4.9 SANITASI	1.055.600.000	1.055.600.000	100,00
	TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS	24.653.800.000	24.653.800.000	100,00
	TOTAL DANA PERIMBANGAN	359.343.668.000	362.346.090.819	100,84
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH			
	I. BAGI HASIL PAJAK PROPINSI			
	1.1 PAJAK BHN BAKAR KEND. BERMTR	10.300.000.000	9.050.325.364	87,87
	1.2 BEA BALIK NAMA KEND. BERMOTOR	1.385.000.000	897.650.437	64,81
	1.3 PAJAK KEND. BERMOTOR	1.125.000.000	877.777.713	78,02
	1.4 PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH	67.000.000	37.080.829	55,34
	TOTAL BAGI HASIL PAJAK PROPINSI	12.877.000.000	10.862.834.343	84,36
	II. DANA PENYESUAIAN			
	2.1 TUNJANGAN KEPENDIDIKAN	20.379.787.800	18.676.312.800	91,64
	2.2 DISP (AD-HOCK)	25.190.000.000	25.190.000.000	100,00
	TOTAL DANA PENYESUAIAN	45.569.787.800	43.866.312.800	96,26
	III. PENERIMAAN LAINNYA			
	3.1 ASURANSI KESEHATAN	30.000.000	114.274.000	380,91
	3.2 DANA TASPEN / DAPEM	50.000.000	67.570.000	135,14
	3.3 DANA INSENTIF DAERAH	19.726.672.000	19.726.672.000	100,00
	3.4 BANTUAN BANK DUNIA UNTUK PENDIDIKAN DASAR	1.000.000.000	367.597.500	36,76
	TOTAL PENERIMAAN LAINNYA	20.806.672.000	20.276.113.500	97,45
	TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	79.253.459.800	75.005.260.643	94,64
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	465.502.127.800	459.986.499.531	98,82

3. Permasalahan Dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi di bidang pendapatan dalam tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi atas kewajibannya terhadap daerah
2. Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah
3. Kurangnya kualitas petugas (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah
5. Kurangnya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini PPNS terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi Perda

b. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi secara intens, serta menegakkan dan menerapkan sanksi yang tegas (sesuai ketentuan) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang sengaja melalaikan kewajibannya
2. Perlunya koordinasi yang intensif bagi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah
3. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan lokakarya yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, melakukan sosialisasi, pembekalan dan penyuluhan

tentang peraturan daerah dan aturan-aturan yang berlaku kepada petugas secara berkala

4. Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) untuk kelancaran kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah
5. Meningkatkan pengawasan dari PPNS terhadap pelanggaran Perda oleh wajib pajak dan wajib retribusi

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dengan mengacu pada kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran APBD, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada komponen belanja langsung yang lebih besar dari belanja tidak langsung, dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur serta peningkatan Sektor Potensial Bidang Perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Target Dan Realisasi Belanja

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2010 sebesar Rp. 488.170.772.768,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 453.186.956.880,- atau 93 % dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Adapun belanja pegawai dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 283.297.711.411,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 258.437.216.602,- atau 91,22 % dari total anggaran

b. Belanja Barang dan Jasa

Adapun belanja barang dan Jasa dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 82.742.596.619,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 74.838.778.649,- atau 90 % dari total anggaran

c. Belanja Hibah

Adapun belanja hibah dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 12.775.000.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 12.775.000.000,- atau 100 % dari total anggaran

d. Bantuan Bantuan Sosial

Adapun belanja bantuan sosial dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 6.198.875.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 6.176.444.660,- atau 99,64 % dari total anggaran

e. Belanja Modal

Adapun belanja modal dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 101.856.589.738,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 100.289.852.169,- atau 98 % dari total anggaran

f. Belanja Tidak Terduga

Adapun belanja tidak terduga dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 669.664.800,- atau 67 % dari total anggaran

g. Belanja Bunga

Adapun belanja bunga dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- tidak terealisasi hingga akhir tahun.

3. Permasalahan Dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru
2. Tuntutan dan kebutuhan alokasi belanja dari masing-masing satuan kerja belum dapat dipenuhi secara optimal
3. Sebagian komponen belanja yang terdapat pada standar belanja (*chek price*) tidak sesuai dengan harga pasar yang cenderung fluktuatif

b. Solusi

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut terhadap kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan agar secara bertahap dapat dipenuhi kebutuhan belanja dari satuan kerja
3. Perlu mengsinkronkan standar belanja (*chek price*) dalam penyusunan RKA-SKPD dengan mengantisipasi kemungkinan harga pasar yang cenderung fluktuatif

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib tahun 2010, terdiri dari 276 program dan 1.405 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan, terdiri dari 22 program dan 151 kegiatan
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan, terdiri dari 14 program dan 87 kegiatan
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari 19 program dan 100 kegiatan
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan, terdiri dari 3 program dan 15 kegiatan
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 9 program dan 48 kegiatan
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari 10 program dan 49 kegiatan
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan, terdiri dari 7 program dan 24 kegiatan
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari 12 program dan 50 kegiatan
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari 8 program dan 35 kegiatan
- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari 8 program dan 28 kegiatan

- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari 7 program dan 46 kegiatan
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial, terdiri dari 9 program dan 29 kegiatan
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari 2 program dan 6 kegiatan
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari 8 program dan 33 kegiatan
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, terdiri dari 7 program dan 31 kegiatan
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari 8 program dan 41 kegiatan
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, terdiri dari 18 program dan 93 kegiatan
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum, terdiri dari 76 program dan 412 kegiatan
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian, terdiri dari 6 program dan 36 kegiatan
- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari 11 program dan 39 kegiatan
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan, terdiri dari 6 program dan 34 kegiatan
- 22) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari 6 program dan 20 kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan wajib sampai akhir tahun 2010, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 462.805.120.575,- realisasi

sampai akhir tahun 93,13 %, yang meliputi urusan wajib sebagai berikut :

- 1) Urusan Wajib Bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.658.824.859,- realisasi sampai akhir tahun 90,55 %
- 2) Urusan Wajib Bidang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.930.709.067,- realisasi sampai akhir tahun 87,40 %
- 3) Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.153.080.117,- realisasi sampai akhir tahun 97,72 %
- 4) Urusan Wajib Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.343.769.666,- realisasi sampai akhir tahun 86,38 %
- 5) Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.785.243.206,- realisasi sampai akhir tahun 96,48 %
- 6) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.513.051.890,- realisasi sampai akhir tahun 98,41 %
- 7) Urusan Wajib Bidang Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.507.222.878,- realisasi sampai akhir tahun 97,59 %
- 8) Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.410.279.806,- realisasi sampai akhir tahun 95,65 %
- 9) Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.853.881.985,- realisasi sampai akhir tahun 82,10 %

- 10) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.154.408.269,- realisasi sampai akhir tahun 94,68 %
- 11) Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.724.735.679,- realisasi sampai akhir tahun 98,76 %
- 12) Urusan Wajib Bidang Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.409.066.479,- realisasi sampai akhir tahun 96,79 %
- 13) Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.001.687.200,- realisasi sampai akhir tahun 98,73 %
- 14) Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.148.930.030,- realisasi sampai akhir tahun 91,99 %
- 15) Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.485.735.475,- realisasi sampai akhir tahun 105,34 %
- 16) Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olah Raga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.871.442.454,- realisasi sampai akhir tahun 97,57 %
- 17) Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.373.419.455,- realisasi sampai akhir tahun 91,51 %
- 18) Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.765.393.872,- realisasi sampai akhir tahun 90,15 %
- 19) Urusan Wajib Bidang Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.015.953.520,- realisasi sampai akhir tahun 95,19 %

- 20) Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.574.618.340,- realisasi sampai akhir tahun 98,41 %
- 21) Urusan Wajib Bidang Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.734.284.367,- realisasi sampai akhir tahun 91,56 %
- 22) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.389.382.318,- realisasi sampai akhir tahun 99,02 %

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya batasan atau kriteria baku tentang urusan wajib, sehingga ada kesimpang-siuran dalam mengkategorikan pelaksanaan kegiatan wajib
- 2) Pelaksanaan urusan wajib yang umumnya meliputi kebijakan pelayanan dasar, belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dan alokasi anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat

b. Solusi

- 1) Perlu adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang batasan dan kriteria baku tentang urusan wajib
- 2) Perlu adanya perhatian khusus dalam mengoptimalkan pelaksanaan urusan wajib, dengan peningkatan kewenangan dan alokasi anggaran

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan tahun 2010 terdiri dari 50 program dan 228 kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian, terdiri dari 10 program dan 36 kegiatan
- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan, terdiri dari 4 program dan 13 kegiatan
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 12 program dan 62 kegiatan
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, terdiri dari 6 program dan 34 kegiatan
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian, terdiri dari 6 program dan 30 kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi dan Realisasi anggaran untuk urusan pilihan sampai akhir tahun 2010, sesuai Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 25.365.652.193,- realisasi sampai akhir tahun 94,88 % yang meliputi urusan pilihan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pilihan Bidang Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.927.225.848,- realisasi sampai akhir tahun 93,58 %

- 2) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.339.446.740,- realisasi sampai akhir tahun 98,59 %
- 3) Urusan Pilihan Bidang Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.306.243.400,- realisasi sampai akhir tahun 98,51 %
- 4) Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.483.902.778,- realisasi sampai akhir tahun 93,62 %
- 5) Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.287.849.427,- realisasi sampai akhir tahun 93,79 %
- 6) Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.020.984.000,- realisasi sampai akhir tahun 93,69 %

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum adanya batasan atau kriteria baku tentang urusan pilihan, sehingga ada kesimpang-siuran dalam mengkategorikan pelaksanaan kegiatan pilihan
- 2) Sering terjadi satu SKPD melaksanakan 2 (dua) urusan wajib dan pilihan sekaligus, sehingga selain tidak efisien juga sering menimbulkan kesulitan dalam klasifikasi belanja
- 3) Urusan pilihan pada umumnya meliputi kegiatan strategis dan potensial yang bernilai investasi, namun dalam pelaksanaannya belum menyentuh tujuan dan sasaran yang dimaksud

b. Solusi

- 1) Perlu adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang batasan dan kriteria baku tentang urusan pilihan
- 2) Pelaksanaan urusan pilihan perlu didukung dengan aspek kelayakan usulan program / kegiatan, sehingga mampu mendatangkan nilai tambah bagi investasi daerah

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum

Sebagaimana kita ketahui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut 3 (tiga) azas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas pembantuan, mengacu pada pasal 1 butir (9) Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang menegaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian tugas pembantuan pada hakekatnya merupakan tugas untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2010 yang berasal dari Pemerintah, dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- b. Departemen Perindustrian Republik Indonesia
- c. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

3. Satuan Tugas Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan berupa Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan kerja, dan kegiatan Fasilitas Pendukung Pasar Kerja, Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja serta kegiatan Penyelenggaraan Padat Karya Produktif, yang diarahkan pada peningkatan pengawasan, konsolidasi dan fasilitas pendukung pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan diperuntukkan bagi lembaga kerja dan tenaga pencari kerja di Kota Ternate serta tersedianya sarana dan prasarana padat karya.

- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan berupa Pembantuan Pembinaan IKM, yang diarahkan pada pembinaan pengembangan industri kecil dan menengah guna peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk industri kecil dan menengah dan diperuntukkan bagi kelompok industri kecil dan menengah di Kota Ternate.

- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dengan kegiatan berupa Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan, dan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Pelaku Usaha

Perikanan dan Masyarakat Pesisir, yang diarahkan pada peningkatan mutu dan pengembangan hasil perikanan di Kota Ternate dengan menyediakan *Cold Chain System* (CCS) atau sistem rantai dingin di PPI Ternate dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program PNPM Mandiri-KP Kota Ternate, diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha penangkapan dan budidaya perikanan serta masyarakat pesisir di Kota Ternate.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

a. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Sumber dana untuk 3 (tiga) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 851.054.000,-, realisasi hingga akhir tahun 99,77 %.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 600.000.000,-, realisasi hingga akhir tahun 97,43 %.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Sumber dana untuk 2 (dua) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,-, realisasi hingga akhir tahun 90,85 %.

6. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada umumnya masih tetap sama dengan tahun-tahun yang lalu, meliputi :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas pembantuan yang masih terbatas
2. Sumber daya manusia yang belum memadai
3. Urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan cenderung seragam untuk seluruh Daerah dan Desa tanpa memperhatikan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Desa
4. Penyelenggaraan tugas pembantuan pada umumnya belum didasarkan atas analisis kebutuhan penggunaan sumber-sumber daya dan perencanaan operasional yang dapat menjamin keberhasilan penyelenggaraannya
5. Inisiatif tugas pembantuan selama ini selalu datang dari pihak pemberi tugas, belum membuka peluang inisiatif dari pihak penerima tugas

b. Solusi

Solusi terhadap berbagai permasalahan tugas pembantuan, meliputi :

1. Pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan harus juga meliputi komponen sarana dan prasarana pendukung
2. Perlu disertai dengan pembiayaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagai pelaksana tugas pembantuan di tingkat operasional
3. Perlu ada penyesuaian terhadap objek urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan dengan melihat kebutuhan dan karakteristik wilayah
4. Perlu ada kajian-kajian teknis yang komprehensif atas kelayakan kegiatan pada masing-masing wilayah
5. Perlu diberikan ruang atau akses yang seluas-luasnya bagi pengambilan inisiatif pelaksanaan tugas pembantuan dari

pihak penerima, terutama pada Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Untuk tugas pembantuan yang diberikan sesuai mekanisme tugas pembantuan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota, serta dari Kabupaten/Kota ke Desa dan tidak ada tugas pembantuan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan. Namun demikian, seiring dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan serta dalam rangka merangsang partisipasi masyarakat untuk percepatan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, secara internal Pemerintah Kota Ternate menempuh kebijakan melalui bantuan dana Partisipatif dan dan bantuan Stimulan lainnya bagi Kecamatan dan Kelurahan yang secara tidak langsung merupakan bagian pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam rangka memberdayakan potensi daerah di tengah-tengah kemajuan dan kemampuan masing-masing daerah yang tidak sama, maka perlu ada kerjasama antar daerah di berbagai bidang. Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2010, antara lain :

1. Rapat Kerja Nasional dan Kerjasama dengan 32 Kota di Indonesia dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Jakarta.
2. Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) KOMWIL VI di Kendari.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional I Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada tanggal 22-23 Maret 2010 di Ternate.
2. Pelaksanaan Workshop Pesisir dan kelautan di Kendari

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam menjalin kerjasama antar daerah tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Belum adanya Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi *on line* antar kota-kota tersebut
2. Sarana dan prasarana promosi kedua bidang tersebut pada masing-masing kota yang belum memadai

b. Solusi

1. Perlu di bangun Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi *on line* antar kota-kota tersebut
2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana promosi kedua bidang tersebut pada masing-masing kota yang memadai

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, maka Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga, meliputi :

- a. Kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan Kementrian Pertanian Republik
- b. Kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Politeknik Kesehatan Ternate, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia melalui program Magister Manajemen Sumber Daya Manusia dan program Diploma-III Kesehatan.
- c. Kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan Perpustakaan Nasional
- d. Kerjasama Pemerintah Kota Ternate dengan KPP Pratama

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain :

- a. Penguatan modal gabungan kelompok tani dan ternak.
- b. Keikutsertaan pegawai Pemerintah Kota Ternate dalam menempuh pendidikan program Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia dan program Diploma-III pada Politeknik Kesehatan Ternate

- c. Bentuk kerjasama berupa pemberian bantuan Kapal Perpustakaan Terapung dari Perpustakaan Nasional
- d. Bentuk kerjasama berupa Pengelolaan PBB Sektor Perkotaan/Pedesaan, BPHTP dan PPH

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

- Koordinasi pada tingkat implementasi kerjasama yang belum optimal
- Biaya operasional yang sangat besar sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

b. Solusi

- Peningkatan koordinasi pada tingkat implementasi kerjasama
- Perlu mendapat perhatian Pemerintah dalam mengakomodir biaya operasional Perpustakaan Terapung
- Perlunya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan Dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah, Pemerintah Kota Ternate telah menjalin kerjasama yang harmonis dengan berbagai instansi vertikal, antara lain melalui rapat-rapat koordinasi secara kontinu, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial keagamaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, antara lain :

- a. Pembentukan posko penanggulangan bencana alam
- b. Sosialisasi bahaya bencana alam
- c. Patroli bersama keamanan dan ketertiban masyarakat
- d. Terselenggaranya pelayanan di bidang keagamaan (Ibadah Haji, STQ dan MTQ)
- e. Peningkatan usaha kecil dan menengah melalui fasilitas perbankan

3. Permasalahan Dan Solusi

a. Permasalahan

1. Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya bencana alam yang masih minim
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum
3. Belum terpenuhinya minat masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan quota yang ditetapkan
4. Pelayanan penyelenggaraan haji yang belum optimal
5. Belum semua kelompok usaha kecil dan menengah dapat menikmati fasilitas kredit dari perbankan

b. Solusi

1. Peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya bencana alam
2. Peningkatan penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama tentang penerapan peraturan daerah
3. Peningkatan quota haji
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan haji yang optimal

5. Perluasan fasilitas perbankan bagi kelompok usaha kecil dan menengah

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kebijakan pembinaan batas wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tahun 2010, dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah tentang pembentukan Kelurahan dan Kecamatan baru, walaupun saat ini relatif tidak terjadi konflik perbatasan namun dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan baru pada tahun 2010, maka sosialisasi Perda dan pembinaan batas wilayah perlu dilakukan secara lebih intensif, sehingga dapat diketahui batas kewenangan masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, maka secara intens Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Ternate telah memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kegiatan Pemantauan Terpadu Bersama BMKG dan PVMG (Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama), dalam rangka mengumpulkan data dan informasi akurat untuk disebarluaskan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk antisipasi atau peringatan dini penanganan dan penanggulangan bencana maupun terhadap situasi kedaruratan lainnya, baik pada saat sebelum terjadi, sedang terjadi maupun sesudah terjadi bencana.

Dengan telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Aset Peralatan Pencatat Gempa Bumi dan Tsunami / Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*), yang diadakan dan dikelola pada Badan Kesbangpol dan Linmas telah

diserahterimakan pada tanggal 05 Januari 2011 dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Ternate kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.

Sehubungan dengan itu maka terhitung mulai Tahun 2011 kegiatan koordinasi terpadu dan pelaporan maupun hal lain yang terkait dengan kebencanaan di Kota Ternate, telah ditangani sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate sebagai lembaga teknis di bidang pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Ternate adalah termasuk salah satu daerah atau kawasan yang cukup rawan terhadap kejadian bencana, karena Pulau Ternate sendiri selain dikelilingi oleh lautan, memiliki Gunung Api Gamalama yang masih aktif dan intensitas vulkanologis yang relatif meningkat. Sebagai konsekuensi logis daripada kondisi geografis sebagaimana dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa wilayah kita ini sewaktu-waktu bisa saja ditimpa bencana alam gempa tektonik yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan tsunami maupun gempa vulkanik yang mengakibatkan terjadinya letusan gunung api. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan laporan perkembangan fenomena alam maupun aktivitas Gunung Api Gamalama yang bersumber dari data dan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana (PVMG) - Pos Pengamatan Gunung Api Gamalama, sebagaimana hasil pemantauan pada tahun 2010, sebagai berikut :

↳ Sesuai sumber data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika – Stasiun Ternate bahwa dalam 1 tahun terakhir (2010) diketahui bahwa Gempa Bumi Ekstrim yang pernah terjadi di wilayah Ternate dan sekitarnya adalah sebanyak 599

Gempa Bumi yang terdiri dari 545 getaran lokal, 42 getaran jauh dan 12 getaran dirasakan.

- ↳ Sesuai sumber data dari Pos Pengamatan Gunung Gamalama, pada tahun 2010 cuaca umumnya terang / berawan dan hujan, sedangkan suhu udara basah rata-rata (24 s/d 27°C) dan kering (25 s/d 30°C) dengan kelembaban 91 - 75 %. Hujan yang terjadi sebanyak 292 x dalam 205 hari yaitu hujan gerimis sampai deras.
- ↳ Dan untuk aktivitas Gunung Gamalama asap kawah gunung putih tipis – putih tebal – kelabu tebal, dengan tekanan gas lemah setinggi rata-rata 25 – 250 m di atas puncak bergerak secara merata ke arah Utara, Selatan, Timur dan Barat, status aktivitas Gunung Gamalama sampai akhir 2010 masih tetap dalam status **Waspada** (level II).
- ↳ Untuk pengamatan kegempaan Gunung Api Gamalama, telah terjadi gempa bumi dalam tahun 2010 tercatat sebanyak 7.593 kali (35 dirasakan) yang jenisnya didominasi oleh gempa tektonik dan gempa hembusan yang mengalami peningkatan karena aktivitas Gunung Api Gamalama pada periode Bulan Oktober s/d Desember 2010.

2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Terhadap keberadaan status Gunung Api Gamalama, maka dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, telah dilakukan langkah-langkah sosialisasi sebagai berikut :

- a. Menghimbau kepada masyarakat di sekitar Gunung Gamalama diharapkan tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu tentang letusan, namun tetap meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa mengikuti arahan Pemerintah pada masing-masing

Kelurahan agar dapat dikoordinasikan secara berjenjang ke Kecamatan sampai ke tingkat Kota.

- b. Memperingatkan kepada masyarakat di sekitar Gunung Gamalama dan pengunjung / wisatawan, tidak diperbolehkan mendaki dan mendekati *kawah* yang ada di puncak dalam radius 2 Km.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi melalui Kepala Pos Pengamatan Gunung Gamalama di Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah – Ternate.

3. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Sesuai hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Ternate bahwa kejadian atau fenomena alam luar biasa akibat *Hujan Deras dan Angin Kencang* sewaktu-waktu secara periodik / musiman dapat saja terjadi di wilayah Kota Ternate. Selain itu Kota Ternate termasuk salah satu daerah atau kawasan yang sangat rawan terhadap kejadian bencana, karena Pulau Ternate sendiri selain dikelilingi oleh lautan juga memiliki Gunung Api Gamalama yang masih aktif dan intensitas vulkanologis yang relative meningkat. Karenanya potensi bencana yang menjadi ancaman adalah :

- a. Bencana akibat kejadian *gempa bumi*, baik yang tidak berpotensi maupun yang berpotensi tsunami.
- b. Letusan Gunung Api Gamalama.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Sejalan dengan pertumbuhan Kota Ternate yang terus meningkat, maka berkembang pula beberapa kawasan yang memiliki nilai strategis dan ekonomis karena merupakan sentra-sentra jasa dan perekonomian,

oleh karena itu agar kawasan-kawasan strategis tersebut dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap terjaga nilai ekonomisnya, maka kedepan perlu dikelola secara khusus dan bila perlu dapat diproteksi dengan peraturan daerah. Pada tahun 2010 terdapat kegiatan lanjutan bantuan teknis *Zoning Regulation* Penyusunan Revisi RTRW kerjasama dengan Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi

- a. Agenda Pemilihan Walikota Ternate tahun 2010 pada tanggal 21 April 2010, dimana intensitas suhu politik di Kota Ternate relatif meningkat tetapi masih dalam batas kewajaran, sehingga tidak terlalu mempengaruhi situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan kata lain secara umum kondisi Kota Ternate selama tahun 2010 tetap kondusif, dan proses suksesi dan agenda demokrasi Pemilihan Walikota tetap dapat berlangsung dengan suasana yang aman dan damai serta kamtibmas yang tetap terkendali.
- b. Konflik antar intern umat beragama, yakni perselisihan antara Jemaat GMIH dengan Jemaat GPM di Kelurahan Mayau Batang Dua pada tanggal 29 Maret dan 4 April 2010.
- c. Perkelahian antar kampung (Tarkam), yakni pertikaian antara warga Kelurahan Toboko dengan warga Kelurahan Mangga Dua pada 22 September 2010.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Adapun institusi yang memiliki tugas dan fungsi menangani ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kota Ternate adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja dengan bekerjasama unsur POLRES Ternate, KODIM 1501 Ternate dan instansi lainnya, baik dengan melakukan penertiban maupun berbagai razia terhadap kegiatan yang dapat mengarah pada gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

Adapun jumlah personel dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 57 pegawai, yang terdiri dari personel di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebanyak 31 pegawai dengan pangkat dan golongan yaitu gol. II 12 orang, gol. III 15 orang dan gol. IV 4 orang, dan dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 37 pegawai dengan pangkat dan golongan yaitu gol. II 26 orang, gol. III 9 orang dan gol. IV 2 orang.

4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Adapun sumber dan jumlah anggaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 dengan total nilai anggaran Rp. 9.373.419.455,-.

5. Penanggulangan Dan Kendalanya

Penanggulangan dan pembinaan ketenteraman serta ketertiban di Kota Ternate tahun 2010, dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan penertiban terhadap gangguan trantibum, yang meliputi :

- a. Terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan akibat ketegangan situasi politik di Kota Ternate

Melakukan koordinasi terpadu bersama pihak terkait dalam rangka melakukan tugas patrol keliling, pengamanan langsung dan pemantauan.

- b. Terhadap kasus konflik antara Jemaat GMIH dengan GPM di Kelurahan Mayau Kecamatan Batang Dua

Memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Jemaat GMIH dengan GPM bersama pihak terkait (Kementrian Agama Kota Ternate, FKUB Kota Ternate, Badan Kerjasama Antar Gereja Se-Kota Ternate, TNI dan POLRI), yang secara substansi ditekankan agar dapat patuh dan taat terhadap pokok-pokok kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta tetap saling menjaga dan menghormati kerukunan, toleransi maupun kebebasan keberagaman antara Jemaat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Terhadap kasus pertikaian antara warga Kelurahan Toboko dengan warga Kelurahan Mangga Dua

Memfasilitasi pertemuan antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda guna membuat kesepakatan dan perjanjian damai dengan ketentuan pemberian sanksi tegas jika masih ada di antara pihak-pihak yang mencoba mengulangi atau membuat masalah, serta pelaksanaan halal bi halal oleh Pemerintah Kota Ternate bersama seluruh komponen warga masyarakat Kelurahan Toboko dan Kelurahan Mangga Dua.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam penanggulangan masalah keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Ternate, senantiasa dikoordinasikan dengan melibatkan pihak aparat TNI dan POLRI. Selain itu guna menciptakan sekaligus menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kelurahan juga diperbantukan oleh komponen Satuan

Linmas Organik Kota Ternate yang berjumlah 100 Anggota yang berdomisili dan tersebar di Kelurahan dalam wilayah Kota Ternate.

Guna menindaklanjuti beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat sekaligus sebagai upaya koordinatif dalam memantau, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi tentang perkembangan situasi dan isu strategis, potensi ancaman dan gangguan keamanan di Kota Ternate, maka Badan Kesbangpol dan Linmas telah memfasilitasi pembentukan lembaga ekstra (dengan Keputusan Walikota Ternate) yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait, baik pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perguruan Tinggi maupun stakeholder lainnya termasuk TNI dan POLRI, melalui Keputusan Walikota Ternate, yakni :

- ✚ Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Ternate;
- ✚ Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Ternate;
- ✚ Satuan Tugas (SATGAS) Kewilayahan Kota Ternate;
- ✚ Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Kota Ternate.

BAB VII

P E N U T U P

Walaupun kita sadari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan LKPJ di maksud, sesuai pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 hanya dibahas oleh DPRD secara internal dan *output*-nya berupa keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi yang berupa catatan strategis dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, namun kita semua menghargai bahwa hal ini selain merupakan bagian dari prosedur dan mekanisme normatif yang harus kita penuhi, juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Karena kita sadari masih banyak terdapat kekurangan dan permasalahan yang menuntut tanggung jawab kita bersama. Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini akan menjadi laporan awal tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebelum kita masuk pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran yang sesuai aturan normatif akan disampaikan setelah diperiksa oleh BPK, yang mencakup laporan nota perhitungan, aliran kas dan neraca daerah.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, Saya bersama Saudara Saya Ir. Arifin Djafar, MBA selaku Walikota dan Wakil Walikota Ternate, perlu menyampaikan

apresiasi secara khusus kepada segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, karena terjalinnya kemitraan yang kondusif di awal kepemimpinan kami, dengan harapan kemitraan ini tetap dapat dipertahankan, karena perjalanan kami dalam mengemban misi dan amanat rakyat terasa masih panjang, serta berbagai tantangan dan permasalahan kedepan semakin kompleks, yang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab kita bersama, baik dalam melaksanakan berbagai kebijakan program/kegiatan strategis, maupun dalam menciptakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, melalui tertib penyampaian laporan pertanggungjawaban yang selalu kita laksanakan tepat waktu, sesuai *schedule* yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, serta berbagai saran dan catatan strategis yang disampaikan dalam konteks laporan ini, dalam rangka mengefektifkan kebijakan kedepan.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Pimpinan instansi vertikal maupun pihak ketiga, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini, demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melaksanakan amanat rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini.

Ternate, 8 Maret 2011

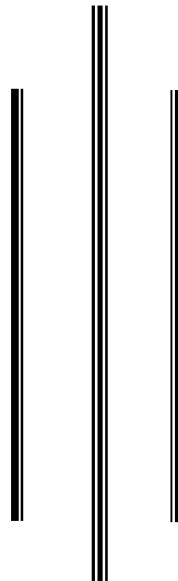
WALIKOTA TERNATE

H. BURHAN ABDURAHMAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2010
DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TERNATE**

TANGGAL, 8 MARET 2011



PEMERINTAH KOTA TERNATE

TAHUN 2011